

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat internasional mengusung isu mengenai adanya ‘kesenjangan informasi’ (*informasi gap*) dan ‘kesenjangan digital’ (*digital divide*) di dalam sebuah forum yang disebut Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Masyarakat Informasi (*World Summit on the Information Society / WSIS*) yang merupakan inisiatif lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberikan mandat untuk penyelenggaraannya kepada *International Telecommunication Union (ITU)*.

Melalui dokumen *Declaration of Principles* (<http://www.itu.int/wsis/documents>) tertanggal 12 Desember 2003, para wakil negara dari seluruh dunia kembali memperbaharui komitmen mereka terhadap pembangunan masyarakat informasi (*information society*). Bahkan isu pembangunan masyarakat informasi telah dijadikan sebagai tantangan global dalam menyongsong milenium baru. Deklarasi ini juga menekankan peranan penting *Information and Communication Technology (ICT)* sebagai salah satu pilar utama menuju masyarakat informasi. *ICT* dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah *Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK)* yang didefinisikan sebagai konvergensi teknologi informasi (*IT*), telekomunikasi, multimedia dan penyiaran

Untuk mengusung visi memujudkan masyarakat informasi dan mengatasi kesenjangan digital, *WSIS* pertama pada bulan Desember 2003 di Jenewa telah menghasilkan :

- *Declaration of Principles*, yaitu deklarasi yang menyatakan keinginan dan komitmen Pemerintah berbagai negara untuk membangun masyarakat informasi secara menyeluruh.

Prinsip dasar yang dideklarasikan dalam *WSIS* untuk mewujudkan masyarakat informasi antara lain diperlukannya peran pemerintah

dalam mempromosikan pembangunan TIK dan pentingnya infrastruktur TIK.

- *Plan of Action*, yaitu deklarasi yang menerjemahkan dan mewujudkan keinginan bersama untuk mengembangkan TIK dalam rangka mengatasi kesenjangan digital.

Kesamaan visi dan misi yang juga sejalan dengan Millenium Declaration itu kemudian dituangkan kedalam penentuan Action Plans. Beberapa hal yang telah disepakati untuk jangka menengah dan sudah harus tercapai pada tahun 2015 adalah menghubungkan seluruh desa dan menyediakan akses bagi seluruh masyarakat dan memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses Internet.

Sementara itu, WSIS kedua pada bulan Nopember 2005 di Tunisia menghasilkan :

- *Tunis Commitmen*, yaitu payung komitmen politik kepala negara dalam mewujudkan masyarakat informasi;
- *Tunis Agenda for Action*, yaitu pedoman operasional untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Kedua butir rencana aksi WSIS tersebut diterjemahkan dalam bentuk penyediaan akses telepon, internet, televisi dan radio untuk komunitas yang dapat disediakan melalui sekolah-sekolah, perpustakaan umum, pusat kesehatan, dan lain-lain.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa telekomunikasi memberi banyak benefit dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Memperhatikan dampak positif kehadiran telekomunikasi di pedesaan, sudah selayaknya apabila seluruh desa di Indonesia memiliki akses telekomunikasi. Lebih dari sekadar memberikan benefit kepada masyarakat pedesaan, ketersediaan akses telekomunikasi di pedesaan juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Pertimbangannya, komunikasi yang efektif, bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Selain

memberikan dampak positif bagi desa bersangkutan, kehadiran akses telekomunikasi di pedesaan pada gilirannya juga akan mendukung penetrasi telekomunikasi secara nasional. Peningkatan penetrasi telekomunikasi secara umum akan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Internasional Telecommunication Union (ITU) (*article 95*) setiap peningkatan penetrasi telekomunikasi (*fixed line*, satu persen akan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi hingga tiga persen.

Pemerintah telah memiliki program yang sejalan dan mendukung komitmen WSIS yaitu program Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal, yang bertujuan menyediakan akses telekomunikasi bagi daerah pedesaan. USO pilot project telah dijalankan pemerintah sejak tahun 2003 dengan membangun 1 telepon akses untuk 1 desa, dan pada tahun 2003 dan 2004 telah dibangun akses di 5.354 desa.

Sedangkan pada tahun 2008, telah diadakan tender USO kembali untuk kelanjutan program penyediaan telepon desa tersebut. Pelaksanaan USO pada tahun 2008 – 2025 melalui Program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

- Jangka Pendek : Terwujudnya desa berdering pada tahun 2008 sebanyak 31.824 desa di seluruh Indonesia.
- Jangka Menengah : Terwujudnya desa punya internet (desa pintar) tahun 2015 dengan mengimplementasikan pelayanan akses informasi di seluruh kecamatan
- Jangka Panjang : Terwujudnya masyarakat informasi (*information society*) pada tahun 2025 melalui penyelenggaraan pemusatan pelatihan, pemanfaatan akses informasi, penyelenggaraan TV broadcast (*agregated broadcast*) berbasis kebutuhan masyarakat dan pelayanan informasi lainnya

Program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yaitu tujuan yang akan di capai dalam kurun waktu 2010-2014 di bidang Infrastruktur Informasi dan

Komunikasi adalah tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah *blank spot* dengan salah satu indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014 yakni jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di Wilayah Pelayanan Umum Telekomunikasi (USO).

Program USO pada dasarnya adalah akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pedesaan yang belum terjangkau akses telekomunikasi dan informatika. Sebagaimana program USO yang pernah dikembangkan sebelumnya, pada program USO Tahun 2009 orientasi utama program adalah penyediaan akses telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi komunal atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu *acesability* atau ketersediaan akses telekomunikasi menjadi sasaran utama pemerintah pada program ini. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan pada masing masing desa USO minimal memiliki satu akses telekomunikasi (satu desa satu akses). Selain akses telekomunikasi minimal satu akses untuk setiap desa, Pemerintah melanjutkan Program Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) sehingga, pemenang tender diwajibkan menyediakan akses untuk layanan internet beserta fasilitas pendukungnya seperti komputer dan server pada setiap lokasi Ibukota Kecamatan.

Dalam upaya mencapai optimalisasi Penyediaan Pusat Layanan berupa percepatan penyediaan layanan teleponi dan internet di kecamatan di wilayah pelayanan universal telekomunikasi sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa, serta sebagai bahan masukan untuk kebijakan KPUT/USO, perlu dilakukan penelitian yang menggambarkan analisis strategi implemementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan pada pelaksanaan KPUT/USO di Indonesia.

1.2 Permasalahan (Identifikasi Masalah)

Indikator keberhasilan program KPU/USO bukan semata-mata dari aspek ketersediaan dan keterjangkauan. Keberhasilan program KPU/USO akan ditentukan apakah fasilitas yang tersedia dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Program KPU/USO menjadi tidak ada artinya, apabila fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu pula dikembangkan suatu analisis strategi agar infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang ada di pedesaan bisa dimanfaatkan secara optimal dan sesuai peruntukannya. Untuk itu, permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

- a. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan program penyediaan layanan internet di kecamatan;
- b. Bagaimana strategi implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan pada pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana ditulis di atas maka maksud dan tujuan penulisan ini adalah menghasilkan rekomendasi strategi implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada pelaksanaan KPU/USO Telekomunikasi di Indonesia sebagai masukan dalam kebijakan penerapan PLIK.

1.4 Pembatasan Masalah

Agar didalam penyajian penulisan penelitian ini tidak menjadi bias terhadap permasalahan-permasalahan lain dan lebih fokus pada pokok permasalahan yang disampaikan di atas, maka dalam penulisan penelitian ini kami membatasi pada identifikasi isu-isu penting yang relevan untuk dibahas meliputi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan pada pelaksanaan KPU/USO di Indonesia dari sisi pemerintah/regulator serta tidak melakukan analisis pada aspek pendanaan.

1.5 Metodologi Penelitian

Metoda penelitian diawali dengan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan tahapan – tahapan berikut :

a. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan konsep-konsep teoritis dan informasi-informasi lain yang dapat mendukung penelitian. Studi pustaka merujuk pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan USO di Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundangan maupun cetak biru/masterplan telekomunikasi yang telah ditetapkan, jurnal-jurnal, buku teks dan artikel-artikel yang menunjang pada penelitian yang dilakukan.

b. Pengumpulan data .

Selain dari studi pustaka, pengumpulan data juga dilakukan melalui penyebaran kuisisioner kepada instansi berwenang atau kompeten dalam penyelenggaraan KPU/USO Telekomunikasi.

c. Tahap Analisis

Analisis dilakukan terhadap data – data yang telah dikumpulkan, untuk kemudian dijadikan dasar terhadap penyusunan rekomendasi strategi pelaksanaan kebijakan yang diterapkan sebagai tujuan dari penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan thesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Di Indonesia

Menjelaskan perkembangan dan kinerja di sektor telekomunikasi dan Informatika di Indonesia serta menjelaskan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat melalui sektor TIK dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung TIK.

Bab III Pelaksanaan Penyediaan KPUT/USO Indonesia

Menjelaskan kebijakan KPUT/USO, perkembangan dan tahapan penyediaan KPUT/USO di Indonesia dari tahap awal Program Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Perintisan pada tahun 2003 dan 2004 sampai Program penyediaan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan pada tahun 2008, dan rencana Program Penyediaan Layanan Internet Kecamatan.

Bab IV Analisis dan Pembahasan Strategi

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis strategi dalam Implementasi Penyediaan PLIK berupa identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan program dan strategi implementasi PLIK dengan menggunakan pendekatan SWOT

Bab V Kesimpulan

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian ini